

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUMARNI PANIKKAI**
2. Jabatan : **KEPALA LOKA**
3. NHK : **872586**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZFJ (CALYA) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	36.554.263
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	156.554.263
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	245.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-88.445.737

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVA MAYA MUHAMMAD
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 781558

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>760.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m <sup>2</sup> /10 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA GORONTALO, LAINNYA Rp. 760.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>72.750.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>8.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>840.750.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>39.600.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>801.150.000</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD YUSUF ANTU
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 277281

**II. DATA HARTA**

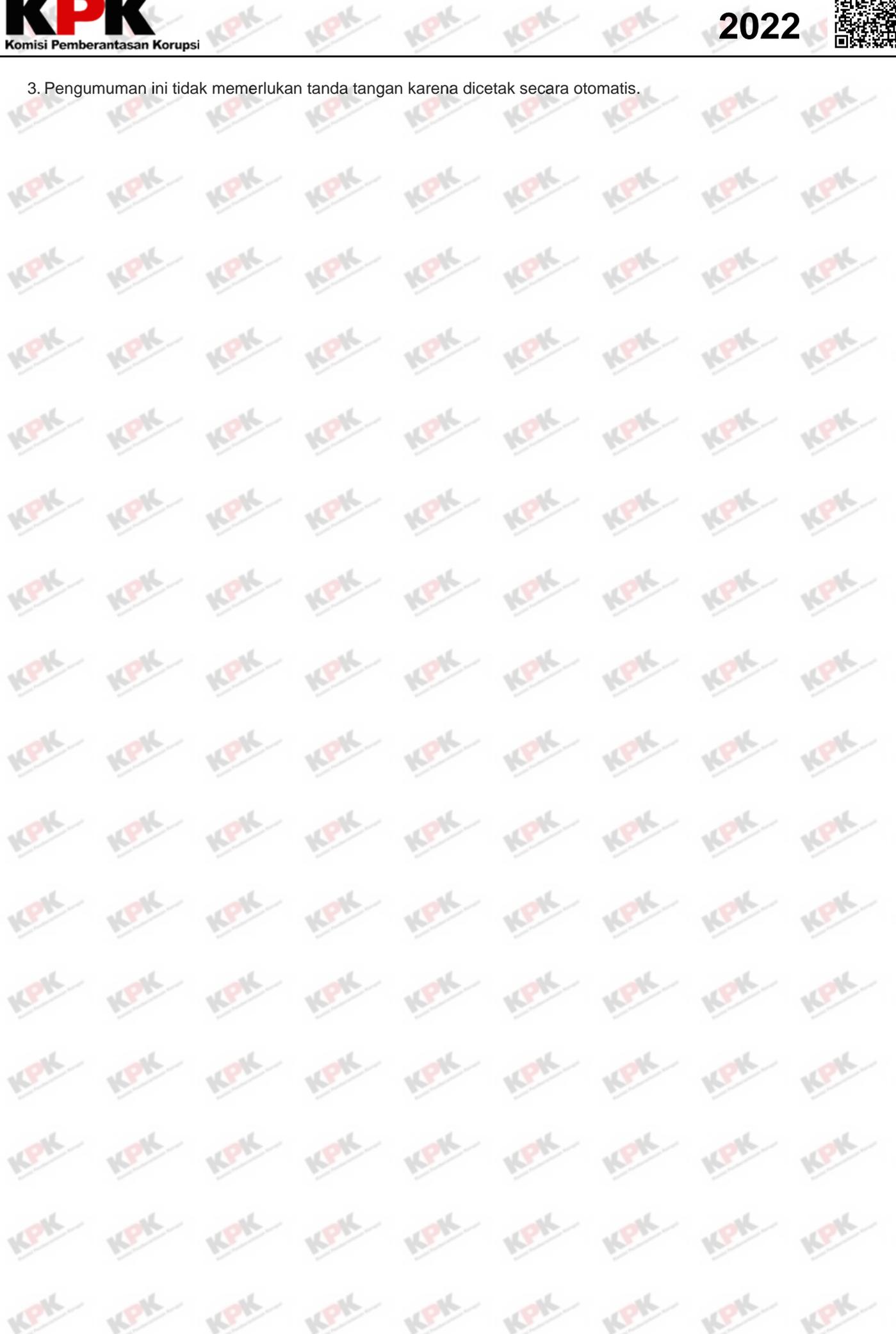
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	75.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m <sup>2</sup> /160.7 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BONE BOLANGO, WARISAN Rp. 75.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	154.500.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	18.350.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	3.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	250.850.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	120.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	130.850.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NON BOTUTIHE**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **872495**

**II. DATA HARTA**

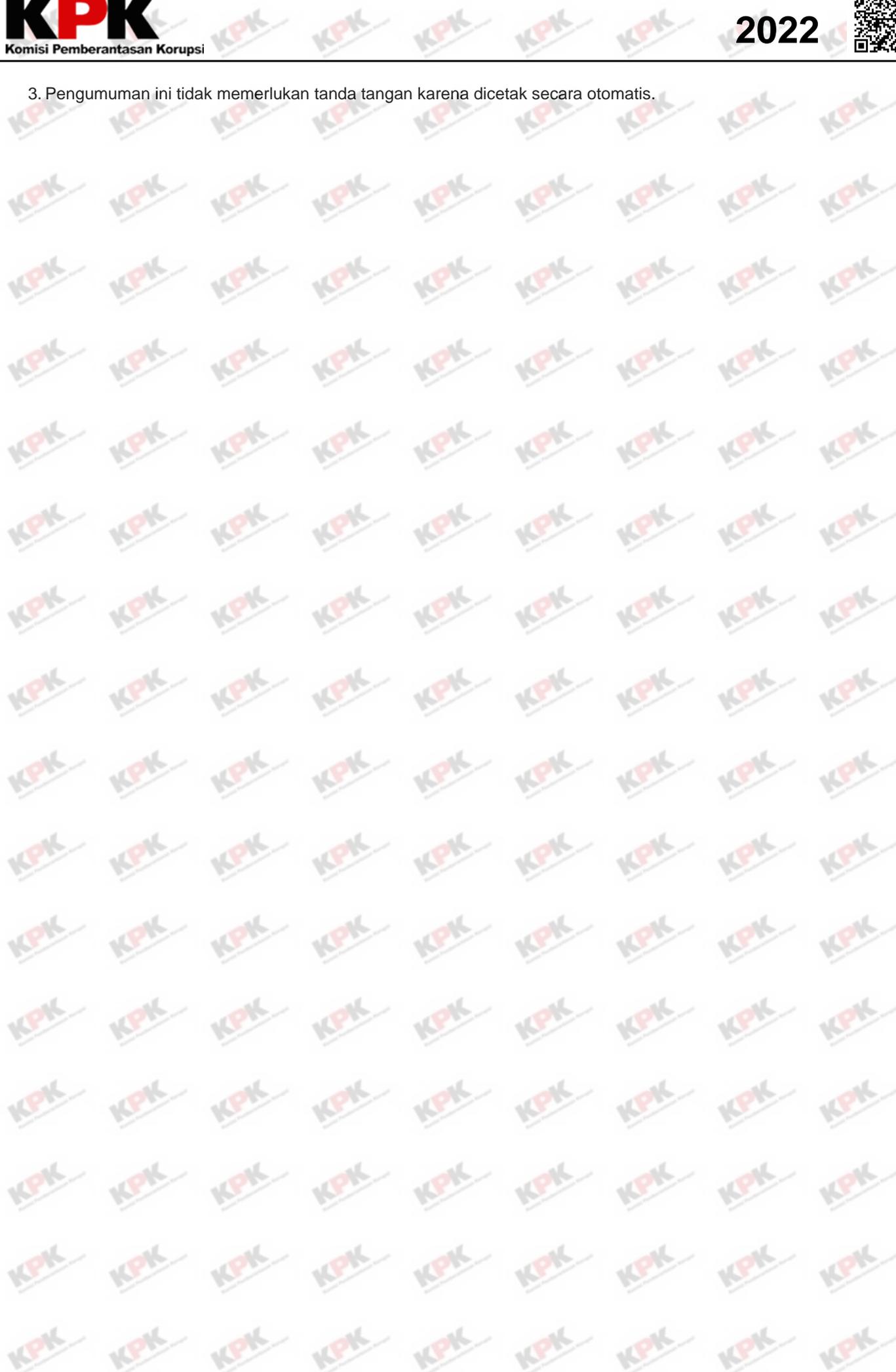
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.935.500.000
1. Tanah Seluas 7.742 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 1.935.500.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	350.000.000
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	24.660.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	48.900.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.359.060.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	129.800.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.229.260.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RISMAN DJAFAR
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 886806

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>350.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/144 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>8.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>1.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	<b>359.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>359.000.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NITAM KASIM,
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 884029

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>300.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>50.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA SOLUNA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>21.068.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>700.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>----</b>
Sub Total	Rp.	<b>371.768.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>5.250.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>366.518.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.